

# Pos Bangga Kencana



PANDUAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BANGGA KENCANA  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN



DIREKTORAT BINA PENGGERAKAN LINI LAPANGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
2023

**POS BANGGA KENCANA  
PANDUAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PROGRAM BANGGA KENCANA  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

**Pelindung :  
Kepala BKKBN**

**Penanggung Jawab :  
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi**

**Tim Penyusun :  
Tim Demi Kita  
I Made Yudhistira Dwipayama, M.Psi  
Anita Latifah, S.Si, MH  
Septriyanti, SKM  
Zainal Arifin, S.An  
dr. Mila Yusnita  
Susiin, S.Pd  
Dra. Imas Rochaeni**

**Diterbitkan oleh :  
Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Jl. Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
13650  
Email : ditbinlap@bkkbn.go.id**

bkkbn 



# KATA SAMBUTAN

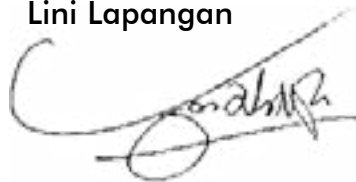
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Peran kepala desa sangat di butuhkan karena mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Pemerintah Desa mempengaruhi

keberadaan peran-serta masyarakat dalam pelayanan publik di desa Satu-satunya faktor dari masyarakat yang dorongan atau motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Perubahan PPKBD dan SUB PPKBD menjadi Pos Bangga Kencana sangat penting sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan program bangga kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan. Dalam penyusunan buku ini bertujuan untuk panduan bagi Pos Bangga Kencana untuk menyelenggarakan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

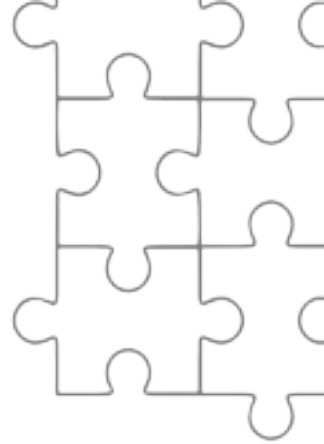
Jakarta, November 2023  
Direktur Bina Penggerakan  
Lini Lapangan



I Made Yudhistira



# DAFTAR ISI



Kata Sambutan	4.
Daftar Isi	6.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>8.</b>
A. Latar Belakang	9.
B. Tujuan	13.
C. Ruang Lingkup	13.
<b>BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>14.</b>
D. Kebijakan	15.
E. Strategi	15.
<b>BAB III POS BANGGA KENCANA DI WILAYAH DESA/KELURAHAN</b>	<b>18.</b>
A. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa/Lurah	19.
B. Program dan Kegiatan Program Bangga Kencana di Desa/ Kelurahan	24.
C. Sasaran Program Bangga Kencana	33.
D. Kelembagaan Pos Bangga Kencana di Wilayah Setingkat Desa/ Kelurahan	34.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI	44.
A. Pemantauan	45.
B. Evaluasi	45.
C. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi	46.
BAB V	48.
Penutup	49.



# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian tersebut membawa ke dalam konsep otonomi asli yang telah dimiliki desa sejak dulu, yang membuat desa mempunyai hak otonomi terbesar dibanding otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam pemerintahannya, Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dipandang mempunyai potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas di sebuah desa. Kepala Desa juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya.



Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Peran kepala desa sangat di butuhkan demi memberikan pelayanan sempurna, meskipun terdapat kasus dalam memberikan pelayan seperti penyelenggaraan pelayanan di desa berupa pembuatan surat domisili bagi masyarakat desa. Kepala desa tidak ada di kantor desa atau di rumah justru kepala desa ada di perkebunan. Hal ini peran kepala desa sangat di butuhkan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peranan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.



Dalam hubungannya sebagai penguasa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, inovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dan juga Perangkat Desa lainnya dalam rangka pembangunan desa dan melaksanakan pemerintahan desa.

Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya. Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Penggerakan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.



Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Pemerintah Desa mempengaruhi keberadaan peran-serta masyarakat dalam pelayanan publik di desa Satu-satunya faktor dari masyarakat yang dorongan atau motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Perubahan PPKBD dan SUB PPKBD menjadi Pos Bangga Kencana sangat penting sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan program bangga kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan.



## B. Tujuan

Pos Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Pos Bangga Kencana] bertujuan membantu pemerintah desa/kelurahan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

## C. Ruang Lingkup

1. Kebijakan dan Strategi Pos Bangga Kencana
2. Penyelenggaraan Pos Bangga Kencana
3. Kelembagaan Pos Bangga Kencana
4. Pemantuan Dan Evaluasi



# BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI





## A. Kebijakan




1. Meningkatkan penyelenggaraan di bidang pemerintahan desa/kelurahan; dan
2. Pelayanan dasar di wilayah setingkat salah satunya Program Bangga Kencana melalui pemberdayaan masyarakat.

## B. Strategi



### 1. Pendayagunaan Masyarakat

- 
- a. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan; dan
  - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan.

## 2. Penguatan Masyarakat

- a. Mengidentifikasi potensi masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan melalui pelatihan, workshop/ seminar/lokakarya dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan.



### 3. Fasilitasi Masyarakat

- a. Peningkatan forum rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- b. Peningkatan akses informasi dan pelayanan Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- c. Pengembangan inovasi Program Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan.



# BAB III

## POS BANGGA KENCANA DI WILAYAH DESA/KELURAHAN



## A. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa/Lurah

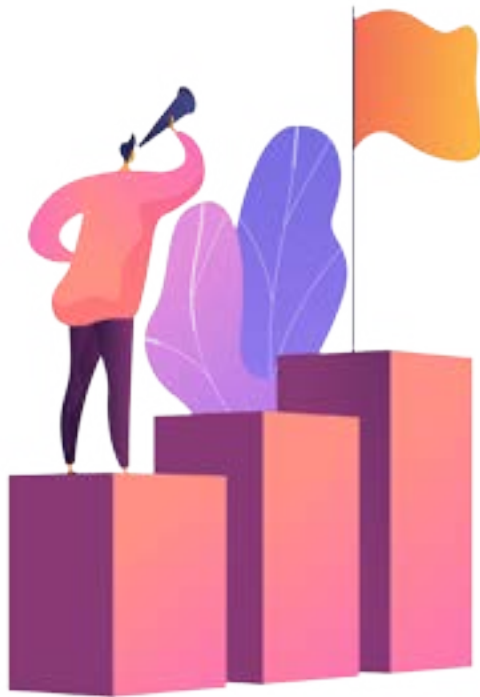
Kepala Desa/Lurah sebagai penyelenggara Pos Bangga Kencana memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1 Sebagai motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

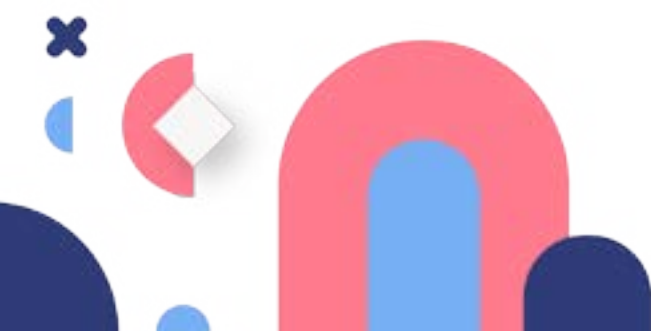
# 2

Sebagai Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.





**3** Sebagai Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum.



Sesuai dengan peran dan tanggung jawab, kepala desa, BPD dan LPM sebagai perangkat pemerintahan desa, hendaknya memiliki komitmen terhadap Program Bangga Kencana dalam pembangunan desa baik RPJMdes, dalam RKP des, dalam Visi Desa, dalam Perdes. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa / RPJM Desa merupakan dokumen kerangka acuan tim yang berisi tahapan, pokok pokok kegiatan beserta informasi pendukung lainnya dan batas waktu pelaksanaan (timeline) selama 5 tahun. Rencana kerja memberikan arahan bagi Tim Penyusun dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa. Program Bangga Kencana sebagai salah satu program pembangunan merupakan program yang mendasar dalam mendukung suksesnya program program pelayanan dasar lainnya dalam pembangunan desa. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan, Program Bangga Kencana sejajar dengan program pembangunan lain dan terumuskan dalam RPJM desa untuk menjadi acuan penggerakan masyarakat desa, baik jumlah penduduk, jumlah Pasangan usia Subur, kondisi Program Bangga Kencana saat ini, kondisi yang diinginkan tahun tahun berjalan baik, ataupun program Pembangunan Keluarga, kondisi dan dukungan partisipasi masyarakat dalam program Bangga Kencana.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa. Komitmen kepala desa terhadap program Bangga Kencana dalam RKP Desa akan tercermin kajian dan pembahasannya dalam rumusan masalah dan prioritas masalah pembangunan desa tahun yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Program Bangga Kencana sebagai kegiatan masyarakat dan kebutuhan masyarakat tentu saja akan melahirkan tuntutan dan kreatifitas masyarakat, oleh karena itu pemerintahan desa dibawah kepala desa yang memiliki komitmen terhadap program Bangga Kencana aspirasi tersebut akan diakomodir, menjadi kebijakan melalui peraturan desa. Kehadiran sosok kepala desa dalam pelaksanaan program Bangga Kencana sangat strategis untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan visi dan misi Desa.



## B. Program dan Kegiatan Program Bangga Kencana Di Desa/Kelurahan

Sejalan dengan kebijakan dan mekanisme operasional program Bangga Kencana, penyelenggaraan program/ kegiatan pada Pos Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan meliputi:

### 1. Program Tahunan Bangga Kencana.

Sesuai dengan azas desentralisasi, pelaksanaan program Bangga Kencana di desa dilakukan dengan memperhatikan kondisi, perkembangan dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap desa/ kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan Bangga Kencana Desa baik :

- a. kondisi saat ini;
- b. kondisi yang ingin dicapai;
- c. bagaimana cara mencapainya baik penggerakan maupun pelayanan; dan
- d. jadwal tentatif kegiatan dan pelaksana kegiatan.

Perencanaan program Bangga Kencana tahunan desa /kelurahan disusun oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB bersama dengan Pos Bangga Kencana yang diketahui Kepala Desa. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling berkaitan dengan RKP desa /kelurahan tahun berjalan.

## 2. Pendataan Keluarga.

Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan program Bangga Kencana untuk dasar pelaksanaan operasional, setiap desa perlu memiliki data yang dinamis. Untuk tersedianya data setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk, PUS dan peserta KB dan pembangunan keluarga.



### 3. Sarasehan

Sarasehan adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang rileks. Dalam pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin dipersilakan dengan bebas dan terbuka dan secara rileks dalam suasana yang ceria menyampaikan gagasan dan saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi topik pembicaraan.

Kegiatan sarasehan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana adalah pertemuan di tingkat RT/RW yang dihadiri sekelompok masyarakat yang membahas permasalahan program Bangga Kencana untuk mencari solusi dan pemecahan kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.



#### 4. Rakor awal tahun

Rapat koordinasi Bangga Kencana awal tahun adalah pertemuan pemerintahan desa dengan para pengelola Bangga Kencana dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi program yang meliputi : evaluasi kegiatan/masalah cakupan program, upaya/rencana dan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan pelebagaan program tahun berjalan secara bersama sama dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.



## 5. Pembinaan Pos Bangsa Kencana

Pos Bangsa Kencana yang terdiri dari pengurus Pos Bangsa Kencana Tingkat Desa dan tingkat RW serta Kader dari kelompok kegiatan (Poktan). Pembinaan IMP/Poktan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Pembinaan pertemuan secara berkala;
- b. Pertemuan secara berkesinambungan;
- c. Kunjungan ke tempat kegiatan;
- d. Pemberian dukungan insentif kegiatan;
- e. Memenuhi kebutuhan sarana kegiatan;
- f. Melakukan study banding/wisata karya; dan
- g. Cara lainnya.





## 6. Kegiatan Pelayanan Bangga Kencana.

Pelayanan KKBPK adalah bentuk kegiatan fasilitasi atau proses melayani keluarga/masyarakat yang dilakukan para IMP maupun Poktan yang meliputi:

### a. Pelayanan Pos Bangga Kencana:

- 1). Kunjungan pembinaan ulang;
- 2). Kunjungan pembinaan ganti cara;
- 3). Pelayanan rujukan akseptor;
- 4). Melakukan pendataan keluarga;
- 5). Membantu mendistribusikan Pil/kondom;
- 6). Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga sejahtera;
- 7). Motivasi peserta KB baru; dan
- 8). Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB.

b. Pelayanan Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Rumah Dataku:

- 1). Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Rumah Dataku;
- 2). Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Rumah Dataku;
- 3). Memberikan pemantauan KKA;
- 4). Menyelenggarakan pembinaan kewirasahaan keluarga;
- 5). Memfasilitasi permodalan dan peningkatan jejaring UPPKA; dan
- 6). Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan seterusnya.

## 7. Pengembangan Inovasi Pos Bangga Kencana

Dipimpin secara aktif oleh peran kepala desa yang tinggi tentu saja partisipasi masyarakat dalam pengembangan program Bangga Kencana akan meningkat demikian pula dukungan dan gerakan semua pihak ini akan melahirkan aspirasi dan inovasi inovasi baru. Pengembangan inovasi kegiatan Bangga Kencana sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Pos Bangga Kencana dan seluruh kegiatan pelayanannya: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Rumah Dataku. Kegiatan pengembangan inovasi program KKBPK meliputi :

- a. Membentuk kegiatan percontohan
- b. Membuat model keterpaduan kegiatan
- c. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat
- d. Membuat model forum penyuluhan masyarakat

## 8. Monitoring dan evaluasi Bangsa Kencana Desa.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring.



Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana meliputi:

- a. Jumlah kelahiran bayi dalam 1 tahun terakhir;
- b. Jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan;
- c. Jumlah perkembangan Peserta KB aktif dan baru dibanding PPM;
- d. Pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan pembangunan keluarga;
- e. Jalannya pelaksanaan kegiatan Pos Bangga Kencana dan Poktan;
- f. Realisasi komitmen dan dukungan pembiayaan berdasarkan RKP Desa; dan
- g. Berjalannya keterpaduan program Bangga Kencana dalam pembangunan desa.



## C. Sasaran Program Bangga Kencana

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui Pos Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/Kelurahan meliputi:

1. Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur;
2. Pasangan Usia Subur;
3. Keluarga yang memiliki Balita;
4. Keluarga yang memiliki Remaja;
5. Keluarga yang memiliki Lansia;
6. Balita;
7. Remaja;
8. Lansia;
9. Keluarga Rentan; dan
10. Mitra kerja lainnya di Desa/Kelurahan.



## D. Kelembagaan Pos Bangsa Kencana Di Wilayah Setingkat Desa/Kelurahan

### 1. Kedudukan Pos Bangsa Kencana

Pos Bangsa Kencana: wadah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di wilayah setingkat Desa/Kelurahan.

### 2. Struktur Kelembagaan dan Keanggotaan Pos Bangsa Kencana

#### a. Struktur Kelembagaan

Struktur Kelembagaan Pos Bangsa Kencana paling sedikit memuat:

- 1) Penanggung jawab
- 2) Pembina.

Kepengurusan Pos Bangsa Kencana:

- a) Ketua;
- b) Sekertaris;
- c) Bendahara;
- d) Bidang-Bidang;
  - (1) Bidang data Bangsa Kencana;
  - (2) Bidang KIE dan Penggerakan; dan
  - (3) Bidang Pelayanan Bangsa Kencana.
- e) Sub.Pos Bangsa Kencana pada Tingkat RW.



- b. Keanggotaan Pos Bangsa Kencana  
Keanggotaan Pos Bangsa Kencana terdiri dari:
- 1) Penanggung jawab Pos Bangsa Kencana dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
  - 2) Pembina Pos Bangsa Kencana dijabat oleh Penyuluh KB/PLKB; dan
  - 3) Keanggotaan pada kepengurusan Pos Bangsa Kencana berasal dari unsur masyarakat yang berpengalaman dalam program Bangsa Kencana dan dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah.



### 3. Tugas

a. Penanggung Jawab Pos Bangsa Kencana, mempunyai tugas:

- 1) Menjamin keberadaan Pos Bangsa Kencana dengan menerbitkan SK;
- 2) Memfasilitasi dan memastikan kegiatan Pos Bangsa Kencana berkelanjutan;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan Pos Bangsa Kencana dengan berbagai kegiatan LKD lainnya; dan
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan Pos Bangsa Kencana.





**b. Pembina Pos Bangsa Kencana, mempunyai tugas:**

- 1) Melakukan pemetaan dan pendataan Pos Bangsa Kencana;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian Pos Bangsa Kencana;
- 3) Melakukan fasilitasi kemitraan Pos Bangsa Kencana dengan mitra kerja;
- 4) Mengawal usulan Musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi Pos Bangsa Kencana.

c. **Kepengurusan Pos Bangga Kencana**, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) **Ketua**, mempunyai tugas:

- a) Menyusun Program dan rencana kerja Pos Bangga Kencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Menyelenggarakan rapat koordinasi Pos Bangga Kencana minimal sekali sebulan;
- c) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) Pos Bangga Kencana;
- d) Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Pos Bangga Kencana;
- e) Mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
- f) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pos Bangga Kencana; dan
- g) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Pos Bangga Kencana kepada Penanggung Jawab dan Pembina.



- 2) Sekertaris, mempunyai tugas:
- a) Mengadministrasikan kegiatan Pos Bangga Kencana;
  - b) Melakukan Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pos Bangga Kencana;
  - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
  - d) Menginventarisir kebutuhan sarana dan Prasarana di Pos Bangga Kencana;
  - e) Melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua; dan
  - f) Menyusun laporan kegiatan Pos Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua.
- 3) Bendahara, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana anggaran;
  - b) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan Pos Bangga Kencana;
  - c) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja Pos Bangga Kencana;
  - d) Mengatur dan mengelola Bukti transaksi; dan
  - e) Menyusun laporan dan pembukuan Pos Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua.



- 4) Bidang-Bidang, terdiri dari:
- a) Bidang data Bangga Kencana, mempunyai tugas:
    - (1) Mengumpulkan data;
    - (2) Mengolah dan menyajikan data;
    - (3) Melaporkan data melalui aplikasi siga; dan
    - (4) Memberikan pelayanan data kepada Masyarakat dan sektor terkait.
  - b) Bidang KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas:
    - (1) Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
    - (2) Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;
    - (3) Menentukan media dan saluran KIE;
    - (4) Melaksanakan promosi dan KIE; dan
    - (5) Melakukan Advokasi dan Penggerakan
    - (6) Bangga Kencana kepada toga, toma, todat, dan mitra kerja.
  - c) Bidang Pelayanan Bangga Kencana
    - (1) Melakukan pelayanan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, Rumah dataku);
    - (2) Melakukan pelayanan KB dan Kespro;
    - (3) Melakukan pelayanan pendampingan Keluarga; dan
    - (4) Melakukan pelayanan lainnya.



Sub.Pos Bangga Kencana pada Tingkat RW, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprogram bangga kencana di tingkat RW.

#### 4. Pembentukan Pos Bangsa Kencana

Pos Bangsa Kencana dibentuk pada wilayah setingkat desa/kelurahan, tahapan dalam pembentukan Pos Bangsa Kencana meliputi:

- a. Sosialisasi dan Koordinasi;  
Sosialisasi dan koordinasi dalam pembentukan Pos Bangsa Kencana dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Lapangan KB lainnya.
- b. Penyiapan sumber daya manusia; dan  
Dalam penyelenggaraan Pos Bangsa Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan perlu menyiapkan sumber daya manusia dari unsur tokoh masyarakat/kader lapangan KB yang dianggap mampu dan mempunyai pengetahuan cukup dalam bidang program bangsa kencana.
- c. Penetapan Keanggotaan Pos Bangsa Kencana
  - a). Keanggotaan pada kepengurusan Pos Bangsa Kencana dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
  - b) Kepala Desa/Lurah menetapkan anggota terpilih dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Struktur Kelembagaan Pos Bangsa Kencana.
  - c) Keanggotaan Pos Bangsa Kencana berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah dapat dikukuh oleh Kepala Desa/Lurah

Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Lapangan KB lainnya agar memfasilitasi dalam pembentukan Pos Bangga Kencana dalam hal:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam pembentukan;
2. Mengusulkan sumber daya manusia Pos Bangga Kencana;
3. Menyiapkan kelengkapan susunan kepengurusan Pos Bangga Kencana;
4. Membantu dalam menyiapkan Rancangan SK Kepala Desa/ Lurah tentang Susunan kepengurusan Pos Bangga Kencana;
5. Membantu menyiapkan/menjelaskan uraian tugas dan melakukan pembinaan kepada Pos Bangga Kencana; dan
6. Melaksanakan kegiatan lainya dalam pembentukan Pos Bangga Kencana



## 5. Kompetensi Pos Bangga Kencana

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pengurus dan Anggota Pos Bangga Kencana.

- a. Pengelolaan Pembentukan Kepengurusan Pos Bangga
- b. Pengelolaan Pertemuan Pembinaan Keanggotaan
- c. Melakukan Pemetaan dan Pendataan
- d. Melakukan Penyuluhan, Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- e. Melakukan Fasilitasi Pelayanan Kontrasepsi
- f. Melakukan Fasilitasi Penggerak Masyarakat
- g. Melakukan Fasilitasi Pembinaan Kelompok Kegiatan: BKB, BKR, BKL, UPPKA, Rumah Dataku serta GenRe



# BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI





## A. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan dengan tujuan agar penyelenggaraan Pos Bangga Kencana sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.

## B. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pos bangga hasil pemantauan maupun hasil pelaporan pada Pos Bangga Kencana. kencana dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan berdasarkan.

## C. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi Pos Bangga Kencana dilakukan terhadap:
  - a. Pemantauan terhadap pos bangga kencana;
  - b. Pemantauan database online pos bangga kencana;
  - c. Monitoring pengendalian lapangan (dalap);
  - d. Pengamatan langsung dilapangan;
  - e. Pemantauan dalam aplikasi siga;
  - f. Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan
  
2. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh:
  - a. BKKBN;
  - b. Perwakilan BKKBN Provinsi;
  - c. OPD KB Kabupaten/Kota;
  - d. Koordinator KB dan Penyuluh KB/PLKB Tingkat Kecamatan;
  - e. Perangkat Desa/Kelurahan;

Apabila dibutuhkan, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan mitra kerja terkait

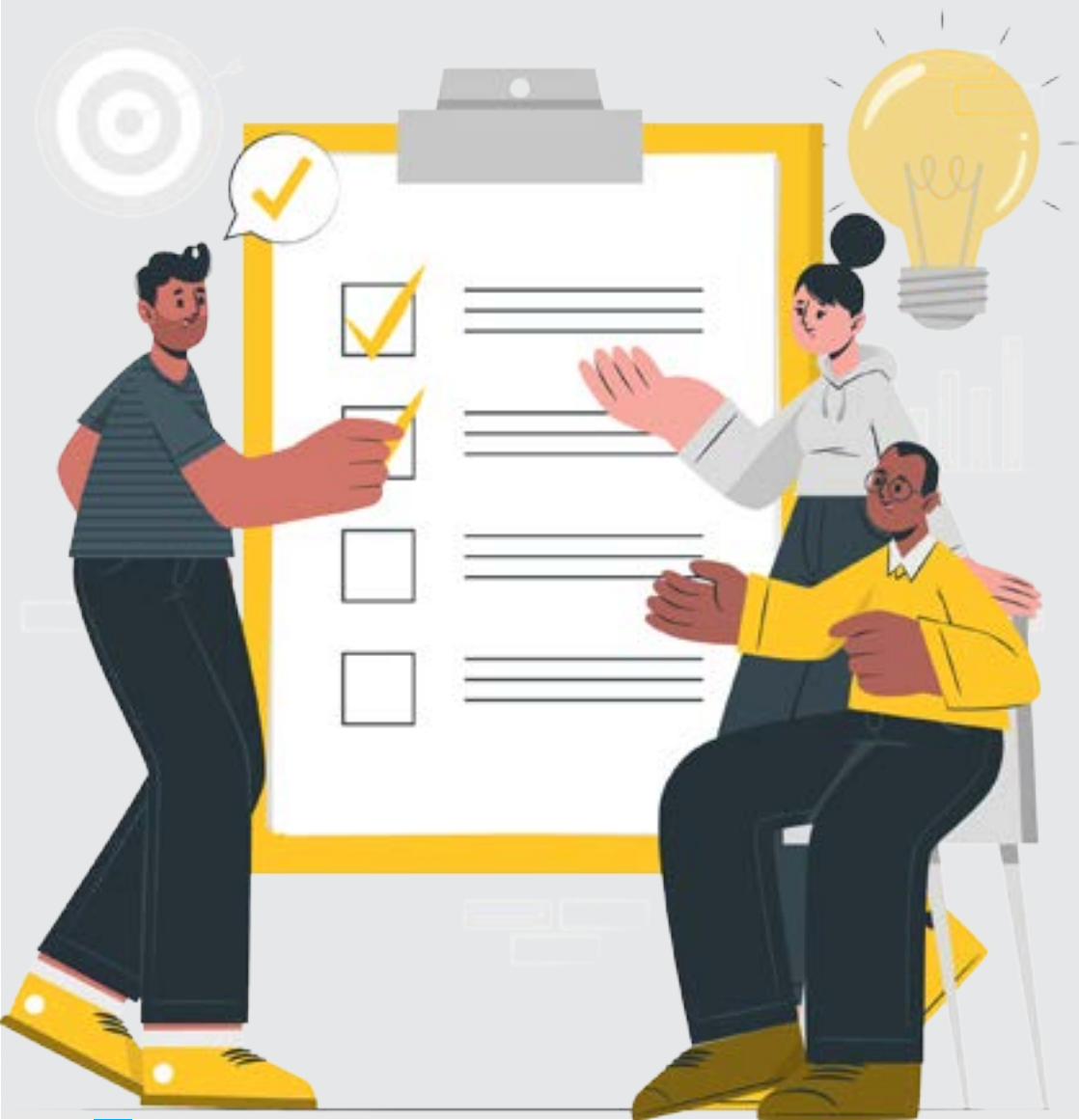




### 3. Waktu pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pos Bangga Kencana dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.



# BAB V PENUTUP





Penggerakan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik





DIREKTORAT BINA PENGGERAKAN LINI LAPANGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
Jl. Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650  
Email : [ditbinlap@bkkbn.go.id](mailto:ditbinlap@bkkbn.go.id)

